

21 Agustus 2015 **Jakarta, Villagerspost.com** - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan diperbaiki. "Selama ini penyerapan anggaran APBN di KKP termasuk rendah meski anggarannya terus meningkat," kata Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim, dalam siaran pers yang diterima *Villagerspost.com*, Jumat (21/8). Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di DPR-RI pada Jumat (14/8) sore. Di dalam RAPBN 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun. Dengan demikian anggaran KKP meningkat dari Rp10,597 triliun pada APBN-P 2015 menjadi Rp15,801 triliun dalam RAPBN 2016. Kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di dalam RAPBN 2016 ini dipergunakan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Alokasi anggaran ini menurun dibandingkan usulan KKP yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, yakni sebesar Rp22,515 triliun. Halim mengatakan, bertambahnya anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bagi Republik Indonesia. "Sayangnya, kesejahteraan masyarakat pesisir belum sungguh-sungguh diprioritaskan, mulai dari nelayan kecil, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir," tegasnya. **Tabel 1. Program dan Alokasi Anggaran KKP**

No	Program	Anggaran (miliar rupiah)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	652.832.336
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	135,169.265
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.405.078.909
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	1.919.065.768
5	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.201.684.018
6	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	2.869.182.621
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	3.575.066.908
8	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	988.675.822
9	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	1.992.020.408
10	Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	776.934.033

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2015), diolah dari *Nota Keuangan RAPBN 2016*. Fakta lain, kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2010-2014 tidak dibarengi oleh kemampuan menyerap anggaran dengan baik (lihat Tabel 2). "Patut disayangkan mesin birokrasi KKP tidak memiliki kesanggupan melakukan penyerapan anggaran dengan baik," kata Halim. Akibatnya, anggaran yang dialokasikan justru minus serapan sebesar Rp141,3 miliar (tahun 2010), Rp383,3 miliar (2011) dan Rp28,6 miliar (2013). Potensi minus serapan ini bisa kembali terjadi di tahun 2015. "Indikasinya, hingga Juni 2015 baru berkisar 11,4 persen dari total alokasi APBN-P KKP tahun 2015 sebesar Rp10,597 triliun," tambah Halim. **Tabel 2. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014 (miliar rupiah)**

	2010	2011	2012	2013	2014
APBN-P	3.280,8	5.559,2	5.914,1	6,598,3	5.748,7

LKPP	3.139,5	5.176,0	5,954.5	6,569,7	5.865,7
Selisih	(-) 141.3	(-) 383,2	(+) 40,4	(-) 28,6	(+) 117

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2015), diolah dari *Nota Keuangan APBN 2010-2014 dan Nota Keuangan RAPBN 2016*

Oleh karena itu, KIARA mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki kinerja anggarannya agar kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pesisir tidak diabaikan dan tertunda sedemikian lama. Terlebih alokasi anggarannya sangat kecil di dalam APBN 2015, yakni 5,2 persen. "Dengan perkataan lain, perlu ada perbaikan sistem pengelolaan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan," tutup Halim. (*) Sumber:

<http://villagerspost.com/special-report/kiara-pengelolaan-apbn-kkp-perlu-diperbaiki/>